



PENGANTAR NOTA KEUANGAN

ATAS

RANCANGAN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN
ATAS
RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

Shalom,

Salve,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Selamat Pagi, Salam Sehat dan Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT,

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Sekretaris Daerah beserta Jajaran,

Insan Pers,

Singkatnya Hadirin yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih, anugerah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna, untuk bersama-sama mengikuti penyampaian *Pengantar*

Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, Pemerintah mengajukan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, yang berdampak pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat dan Pemerintah dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosial serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan.

Dalam situasi sedang bergelut dengan pandemi Covid-19, daerah kita juga dilanda bencana badai siklon seroja pada bulan April 2021 lalu yang selain merusak asset masyarakat dan pemerintah serta berbagai fasilitas umum, juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Kita semua tentunya turut berdukacita atas berpulangnya sanak saudara kita akibat pandemi Covid-19 dan badai seroja ini dan kita mendoakan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat sorgawi atas mereka. Pemerintah dengan dukungan Lembaga Dewan yang terhormat serta seluruh komponen masyarakat terus berupaya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah mencegah meningkatnya penularan Covid-19 serta menangani dampak Covid-19 dan badai seroja tersebut. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk penanganan Covid-19 dan dampak badai siklon seroja ini.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam mengatasi penularan Covid-19 dan dampak-dampaknya, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang salah satunya adalah dengan melakukan Refocusing dan Realokasi APBD untuk mengalokasikan dana yang memadai dan siap digunakan dalam penanganan Covid-19. Selain itu juga terdapat beberapa arahan pemerintah pusat yang wajib dianggarkan dalam Perubahan APBD 2021 ini. Di sisi lain, terganggunya berbagai aktifitas ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi kemampuan daerah dalam pencapaian target pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada pencapaian target pembangunan Tahun Anggaran 2021 yang telah kita tetapkan bersama pada APBD murni TA. 2021 baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Berangsur-angsur pulihnya perekonomian NTT yang ditandai dengan membaiknya kinerja ekonomi daerah NTT dimana pada triwulan II 2021 ekonomi daerah tumbuh 4,22% dibandingkan dengan triwulan II 2020 (*year on year*), dan 5,03% dibandingkan dengan Triwulan I 2021 (*kuartal to kuartal*) menjadi sebuah optimisme dalam menyelesaikan target-target 3 (tiga) bulan ke depan dengan sebuah design perubahan APBD TA. 2021 yang telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD. Sesuai Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dimana Pemerintah Daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi :

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) keadaan darurat; dan/atau;
- 5) keadaan luar biasa.

Selain mengacu pada ketentuan ini, juga terdapat berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sangat mewarnai design Perubahan APBD TA. 2021 ini.

Disamping mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini juga telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah terutama sebagai respon terhadap hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mengikat dan mendesak untuk dilaksanakan yang telah digunakan mendahului penetapan Perubahan APBD, termasuk menampung penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Berikut ini kami sampaikan garis besar Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah kita sepakati bersama dengan Nota Kesepakatan Nomor :

Pem.415.4.43/II/51/VIII/2021
3/NKB/DPRD/2021

Sementara Tahun Anggaran 2021 dengan Nota Kesepakatan Nomor :

Pem.415.4.43/II/52/VIII/2021
4/NKB/DPRD/2021

tanggal 31 Agustus 2021, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dengan rincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN

Rencana pendapatan mengalami perubahan, semula sebesar Rp.6.283.641.817.542,- (Enam Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) berkurang menjadi Rp.5.881.616.887.272,- (Lima Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.402.024.930.270,- (Empat Ratus Dua Miliar Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 6,40%.

Penurunan disebabkan oleh penurunan target pada beberapa kelompok pendapatan, dengan rincian perubahan jenis pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dari semula sebesar Rp.2.033.518.433.142,- (Dua Triliun Tiga Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) berkurang menjadi Rp.1.672.063.318.672,- (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.361.455.114.470,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 17,77%, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah semula sebesar Rp.1.533.442.229.906,- (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) berkurang menjadi Rp.1.283.442.229.906,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) atau 16,30%.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, semula sebesar Rp.205.774.614.333,- (Dua Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berkurang menjadi Rp.102.148.474.750,- (Seratus Dua Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah),

mengalami penurunan sebesar Rp.103.626.139.583,- (Seratus Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau 50,36%.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, semula sebesar Rp.94.348.316.130,- (Sembilan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), berkurang menjadi Rp.64.732.172.050 (Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.29.616.144.080,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau 31,39%.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, semula sebesar Rp.199.953.272.773,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), bertambah menjadi Rp.221.740.441.966,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.21.787.169.193,- (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau 10,90%.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.4.182.128.447.000,- (Empat Triliun Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), berkurang menjadi Rp.4.124.996.231.200,- (Empat Triliun Seratus Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.57.132.215.800,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 1,37%.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula sebesar Rp.67.994.937.400,- (Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), bertambah menjadi Rp.84.557.337.400,- (Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.16.562.400.000,- (Enam Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau 24,36%.

B. BELANJA

Berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan negara serta kemampuan keuangan daerah sebagai akibat pandemi Covid-19, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam Perubahan APBD Tahun 2021 mengalami penurunan.

Secara keseluruhan perubahan belanja Tahun Anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp.7.584.929.735.729,- (Tujuh Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), berkurang menjadi Rp.6.880.472.335.906 (Enam Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.704.457.399.823,- (Tujuh Ratus Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 9,29%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp.5.013.582.925.198.- (Lima Triliun Tiga Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), berkurang menjadi Rp.4.352.913.609.898,- (Empat Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.660.669.315.300,- (Enam Ratus Enam Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 13,18%. Perubahan pada Belanja Operasi terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai, semula Rp.1.561.997.607.953,- (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), bertambah menjadi Rp.1.678.190.464.468,- (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.116.192.856.515,- (Seratus Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) atau 7,44%.
- b. Belanja Barang dan Jasa, semula Rp.1.551.161.659.889,- (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), berkurang menjadi Rp.1.153.528.074.242,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.397.633.585.647,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau 25,63%.
- c. Belanja Bunga, semula Rp.39.307.557.170,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), berkurang menjadi Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.9.307.557.170,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 23,68%.

- d. Belanja Hibah, semula Rp.1.808.722.980.430,- (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), berkurang menjadi Rp.1.480.888.781.188,- (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.327.834.199.242,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau 18,13%.
- e. Belanja Bantuan Sosial, semula Rp.52.393.119.756,- (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), berkurang menjadi Rp.10.306.290.000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.42.086.829.756,- (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 80,33%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal semula direncanakan sebesar Rp.1.858.994.304.311,- (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah), setelah perubahan berkurang menjadi Rp.1.858.350.618.109,- (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.643.686.202,- (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) atau 0,03%. Perubahan pada Belanja Modal terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah, semula Rp.850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, bertambah menjadi Rp.1.340.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau 57,65%.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, semula Rp.100.261.685.911,- (Seratus Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah), bertambah menjadi Rp.203.167.871.848,- (Dua Ratus Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.102.906.185.937,- (Seratus Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 102,64%.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, semula Rp.428.790.271.942,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), berkurang menjadi Rp.224.048.797.017,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Belas Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.204.741.474.925,- (Dua Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 47,75%.

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang semula Rp.1.319.044.795.090,- (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Rupiah), bertambah menjadi Rp.1.419.907.190.656,- (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.100.862.395.566,- (Seratus Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 7,65%.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, semula Rp.8.782.551.368,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), bertambah menjadi Rp.9.886.758.588,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.1.104.207.220,- (Satu Miliar Seratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 12,57%.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya, semula sebesar Rp.1.265.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), berkurang sebesar Rp.1.265.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) atau turun sebesar 100%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga, semula sebesar Rp.68.123.915.460,- (Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribuan Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), bertambah menjadi Rp.196.744.498.781,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribuan Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.128.620.583.321,- (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau 188,80%. Kenaikan ini disebabkan karena pandemi Covid-19 dan diarahkan untuk membiayai belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer semula direncanakan sebesar Rp.644.228.590.760,- (Enam Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribuan Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), setelah perubahan berkurang menjadi Rp.472.463.609.118,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribuan Seratus Delapan Belas Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.171.764.981.642,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribuan Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau 26,66%. Perubahan pada Belanja Transfer terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, semula sebesar Rp.611.228.590.760,- (Enam Ratus Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), berkurang menjadi Rp.462.113.609.118,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.149.114.981.642,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau 24,40%. Penurunan ini akibat kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Bagi Hasil Pajak Daerah sesuai dengan realisasi pendapatan, penurunan target Pendapatan Asli Daerah 2020 dan juga kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah terutama sebagai respon terhadap hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah), berkurang menjadi Rp.10.350.000.000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.22.650.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau turun 68,64%.

C. PEMBIAYAAN

Anggaran Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Anggaran Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.1.301.287.918.187,- (Satu Triliun Tiga Ratus Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), setelah perubahan berkurang menjadi Rp.998.855.448.634,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.302.432.469.553,- (Tiga Ratus Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 23,24%. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebelum perubahan yang direncanakan sebesar Rp.1.711.064.158.187,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Sebelas Miliar Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), berkurang menjadi Rp.1.268.855.448.634,- (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.442.208.709.553,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 25,84%. Perubahan ini karena penyesuaian hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020 dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2020 dan Penerimaan Pinjaman Daerah yang disesuaikan dengan realisasi pinjaman daerah dan

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT tentang Penanganan Jalan Provinsi dari Sumber Pinjaman Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PEN Tahun Anggaran 2021 melalui Mekanisme Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp. 409.776.240.000,- (Empat Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), berkurang menjadi Rp.270.000.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.139.776.240.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 34,11%. Perubahan tersebut dikarenakan pengurangan alokasi penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT pada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dan pengurangan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sesuai dengan realisasi pencairan Pinjaman Daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian garis besar gambaran umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan untuk dibahas melalui mekanisme persidangan yang telah ditetapkan guna mendapat persetujuan bersama.

Akhirnya, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, **DENGAN INI SAYA MENYERAHKAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 BESERTA LAMPIRANNYA KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT, UNTUK DIBAHAS GUNA MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA DAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan memberkati segala karya dan bhakti kita.

Shalom,

Salve,

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamulaikum

Warahmatullahi Wabarakaatu,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Sehat,

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Kupang, 15 September 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Akhirnya, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, **DENGAN INI SAYA MENYERAHKAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 BESERTA LAMPIRANNYA KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT, UNTUK DIBAHAS GUNA MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA DAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan memberkati segala karya dan bhakti kita.

Shalom,

Salve,

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamulaikum

Warahmatullahi Wabarakaatu,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Sehat,

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Kupang, 15 September 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

4 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**